

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem dan prosedur penerimaan kas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Sikka sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
2. Sumber penerimaan kas pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Sikka bersumber dari lain-lain PAD.
3. Masih adanya kendala dalam sistem pengendalian internal dan keterlambatan waktu atas penerimaan kas yang terdapat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4. Penyewaan atas aset yang berupa *Sewa loss, billboard* dan *sound system* merupakan penerimaan kas pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Sikka yang bersumber dari lain-lain PAD.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Sikka, lebih memaksimalkan kinerja agar bisa meningkatkan dan mempertahankan sistem dan prosedur penerimaan kas dengan tetap mengikuti peraturan yang berlaku.
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Sikka harus lebih meningkatkan sistem dan prosedur penerimaan kas agar tidak terjadi lagi keterlambatan waktu yang berdampak pada proses pengakuan atas penerimaan kas pada lain-lain PAD dalam laporan keuangan yang sudah ditetapkan dengan baik sehingga pengelolaan keuangan dapat terwujud dengan efektif dan efisien.
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Sikka juga harus lebih memperhatikan sistem pengendalian internalnya yang menjadi salah satu penunjang dalam sistem dan prosedur penerimaan kas. Agar tidak terjadi penyelewengan atas kas.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Sikka harus lebih mengoptimalkan pengelolaan sektor pariwisata agar penerimaan kas lebih meningkat. Dan dalam pelaksanaan pengendalian intern sudah baik. Namun masih kurang diadakan sosialisasi dan bimbingan bagi para pegawai, untuk itu lebih diadakannya sosialisasi dan bimbingan agar menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2010. *Akuntansi Daerah Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Azhar Susanto, (2013), *Sistem Informasi Akuntansi, -Struktur-Pengendalian-Resiko-Pengembangan*, Edisi Perdana, Lingga Jaya, Bandung.
- Baridwan, Zaki.1993.*Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Bambang Hartadi, (1992), *Sistem pengendalian Internal (dalam Hubungannya dengan, Manajemen dan Audit)*. Edisi 2. Yogyakarta : BPFE
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
- Jugiyanto, H.M., 2005, *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*, ANDI, Yogyakarta.
- Mulyadi, 2001, *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyadi, 2001:6, *Sistem Akuntansi*, Yogyakarta, Penerbit BPFE-Universitas Gajah Mada.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Nugroho Widjajanto. (2001). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Raisa S. Janis, J. Sondakh, H. Sabijono (2015). *Analisis Sitem dan Prosedur Penerimaan PAD Pada Dinas Pnedapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seitaro*.
- Revalia, 2009. *Analisis Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sahata, 2008. *Analisis Penerapan Sistem Penerimaan Kas dari Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Deli Serdang*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Permendagri Nomor 59 tahun 2007 atas perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan perubahan keduanya Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Permendagri Nomor 79 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah*.

PP 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*.

Permendagri 64 Tahun 2013 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*.

Permendagri 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2019 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka*.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-undang Nomor 22 Pasal 79 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.

UUD 1945 Tentang *Sistem Pemerintahan*.

[www.JDIH Kabupaten Sikka](http://www.JDIH.KabupatenSikka).